

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

India merupakan salah satu negara yang terletak di wilayah Asia Selatan. Secara geo-politik negara ini adalah yang terbesar di wilayah Asia Selatan dan apabila ditinjau dari luas wilayah dan jumlah penduduk, namun masalah sosial-ekonomi masyarakat India masih menemui kendala yang menyangkut tingkat kemiskinan pada masyarakatnya yang masih begitu besar pada periode tahun 1996-2004.¹

Pada akhir tahun 2008 jumlah penduduk India menempati peringkat sepuluh besar dunia dengan jumlah 1.129.866.154 jiwa, yang tersusun secara multi etnis antara lain *Indo Arya*, *Dravida* dan *Tibet*. Hampir 56 persen dari jumlah total masyarakat India hidup di bawah garis kemiskinan dengan keterbatasan sandang dan pangan yang kurang memadai, serta tingkat kesehatan dan perumahan yang masih minim.² Fakta ini sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan India yang dipersepsikan oleh masyarakat internasional sebagai negara industri baru yang diprediksikan akan tampil menjadi negara adikuasa baru, seperti halnya Cina dan Iran

¹ "India : Geography and Demography", The Book of Fact, <http://www.cia.gov>., diakses pada tanggal 8 Agustus 2011.

² *Ibid*.

ternyata masih menghadapi berbagai problematika sosial yang menuntut pemerintah India untuk diselesaikan secara mendasar.³

India merupakan salah satu negara di kawasan Asia Selatan yang memiliki struktur sosial yang heterogen, dimana negara ini masih menjalankan dogma-dogma sosial yang kontroversial, yang terefleksi atas dijalankannya sistem kasta atas dasar keturunan, serta ras. Pada akhirnya kondisi menimbulkan banyak benturan di kalangan masyarakat India.⁴ Salah satu masalah yang muncul adalah perdagangan perempuan.

Sejak tahun 1995 tren pertumbuhan perdagangan perempuan di India dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan secara signifikan. Menurut Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP, *United Nation Development Program*) pada tahun 1995 ditemukan 4.860 kasus perdagangan perempuan, kemudian pada tahun 1996 jumlahnya meningkat menjadi 5.080 kasus dan sampai dengan tahun 2000 jumlahnya mendekati 8.000 kasus pertahun.⁵ Gambaran mengenai tren perdagangan perempuan di India tahun 1995 hingga 2008 dapat dilihat pada tabel 1.1. sebagai berikut :

³ Subkhan Hanafi, *Pembangunan Sosial-Ekonomi Asia Selatan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal.23.

⁴ BN Marbun, *185 Negara Dunia : Profil India Edisi Kedua*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hal.78.

⁵ "India Human Development Paper Report : Woman Trafficking", <http://www.undp.org>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2011.

Tabel 1.1.
Tren Perkembangan Perdagangan Perempuan di India
Tahun 1995-2008

No.	Tahun	Jumlah (Kasus Pertahun)
1.	1995-1996	9.840
2.	1997-1998	7.884
3.	1999-2000	8.117
4.	2001-2002	7.448
5.	2003-2004	na
6.	2005-2006	10.048
7.	2007-2008	12.446

NA : not available (data tidak tersedia)

Sumber : "India Human Trafficking Counter Progress : Current Issue",
<http://www.worldvision.com.au>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2011
 dan "Human Trafficking of India : Annual Paper 1995-2000 and 2001-2008",
<http://www.amnestyinternational.org>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2011.

Melalui tabel 1.1. di atas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 1995/1996 kasus perdagangan perempuan berada di atas 9000 kasus. Dua tahun kemudian mengalami penurunan, namun sejak 2005 hingga 2008 terjadi tren peningkatan hingga jumlah kasusnya di atas 12.000 kasus.

Perdagangan perempuan apabila ditinjau dari obyek wilayah tujuannya menurut Departemen Pembangunan Perempuan dan Anak India dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Dari wilayah satu ke wilayah lainnya di India.
- b. Dari wilayah India ke wilayah lainnya di luar negeri.

Dinamika perdagangan perempuan yang sejak tahun 1995 terus mengalami peningkatan ternyata menyebabkan munculnya masalah-masalah lainnya, antara lain

penyebaran HIV-AIDS, munculnya masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga, banyaknya kasus orang hilang dan lain-lainnya. Untuk menangani masalah ini, Pemerintah India telah menjalankan berbagai kebijakan diantaranya penegakan hukum, penyadaran melalui media masa, mengidentifikasi keluarga-keluarga baru yang rentan terhadap *human trafficking* dan beberapa kebijakan lainnya.⁶

Sampai dengan tahun 2008 perdagangan perempuan belum mampu terselesaikan secara elementer oleh pemerintah India. Berbagai upaya telah dijalankan sejak era kepemimpinan perdana menteri Atal behari Vajpayee, antara lain melalui penerapan Undang-undang Perlindungan Sipil dan Pekerja pada tahun 1998. Undang-undang ini dikeluarkan oleh pemerintah India untuk menanggulangi kekerasan kepada para pekerja non-formal, serta untuk mengeliminasi dis-kultural tentang 'chura' yaitu profesi-profesi rendah, antara lain pelayan restoran, pengolahan sampah, buruk kasar dan lain-lainnya dari kekerasan dan penjualan kalangan perempuan anak.⁷

Beberapa aktifis perempuan antara lain "Save of India", "India Muhagaphal" dan "Movement Women Progress of India" juga belum mampu menyelesaikan masalah perdagangan perempuan dan perempuan anak karena masalah yang berkembang secara kompleks. Berdasar pada paparan di atas maka dapat difahami bahwa masalah perdagangan perempuan di India yang muncul pertama kali pada

⁶ "The Human Trafficking India of Departure", <http://www.asianews.com>., diakses pada tanggal 8 Agustus 2011.

⁷ "Human Trafficking in India : About Law", <http://www.fsu.edu>., diakses pada tanggal 18 Agustus 2011.

tahun 1982 dan menjadi masalah yang mengemuka sejak tahun 1995 sebenarnya bukan masalah baru. Berbagai kebijakan dijalankan, namun sampai akhir tahun 2008 kebijakan-kebijakan ini belum mencapai progresifitas yang maksimal.

B. Perumusan Masalah

Melalui uraian latarbelakang masalah di atas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu :

“Bagaimana upaya yang dijalankan pemerintah India dalam menangani masalah perdagangan perempuan pada periode tahun 1995 hingga 2008 dan mengapa masalah ini masih terus terjadi ?”

C. Kerangka Pemikiran

Dalam upaya menjawab rumusan masalah dan menarik hipotesa, maka penulis dalam menganalisa dan menjawab rumusan masalah didukung oleh pendekatan-pendekatan yang relevan, yaitu konsep kegagalan kebijakan yang dikemukakan oleh Quincy Wright. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjembatani kasus tentang mengapa program-program pemerintah ini gagal. Selain itu, juga digunakan konsep pendorong dan penarik perdagangan perempuan yang dikemukakan oleh Stephen Castel dan Mark J. Miller. Pendekatan ini digunakan untuk menjembatani tentang motivasi bagi para perempuan India dan para pemangku kepentingan sehingga kasus ini terus berkembang dan tidak kunjung

terselesaikan. Gambaran mengenai pendekatan tersebut akan dijelaskan pada uraian sebagai berikut.

Perdagangan perempuan merupakan masalah sosial yang lazim terjadi di negara-negara dunia ketiga. Menurut definisi yang dikeluarkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menyatakan bahwa perdagangan manusia, termasuk di dalamnya perdagangan perempuan merupakan perekrutan, pengiriman seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lainnya dari pemaksaan, yaitu penculikan, penipuan, kebohongan, intimidasi dan beberapa tindakan dan lain-lainnya.⁸

Dalam perkembangannya perdagangan manusia menjadi masalah sosial yang “semakin dapat diakomodasi” oleh masyarakat itu sendiri sebagai subyek perdagangan manusia. Atas dasar kesadaran, saling mengerti dan membutuhkan kemudian korban, pelaku dan sasaran (tujuan) menjadi semakin permisif untuk dijalankan.

Menurut Nathalie Rothchild menyatakan bahwa perkembangan *human trafficking* di negara-negara dunia ketiga menunjukkan pergeseran dibandingkan dengan dua dekade silam. Pada tulisannya yang berjudul “The Free Practice of Counter Human Trafficking”, Rothchild menyatakan bahwa :

...para korban human trafficking di beberapa negara, termasuk Indonesia, India, Thailand, Tajikistan dan Cina bukan hanya melibatkan jaringan-jaringan yang menjalankan tindakan pelanggaran hukum ini secara

⁸ “Definition of Human Trafficking”, <http://www.undocs.org>., diakses pada tanggal 8 Agustus 2011.

*sistematis. Lebih dari itu, para korban secara sadar membaurkan dirinya untuk masuk ke dalam lingkaran- praktik ini, sehingga baik pelaku ataupun korban masing-masing akan dapart keuntungan. Semuanya karena motif ekonomi dan pencarian keuntungan sebagai sikap kewajaran bagi setiap manusia.*⁹

Rothchild juga menyatakan bahwa sebab-sebab terjadinya human trafficking adalah menyangkut 3 hal, yaitu :¹⁰

- a. Lemahnya campur tangan negara dan ketidakmampuannya dalam membangun pendekatan-pendekatan teknis dan non-teknis, termasuk mengusahakan pemerataan pembangunan dan pelepasan terhadap ketergantungan unit-unit produksi.
- b. Munculnya inisiatif dari para pelaku sekaligus korban human trafficking dalam mencari kehidupan yang lebih layak dan adanya tawaran-tawaran dan pendekatan secara kondisional dari wilayah atau negara lain di dalam ataupun di luar negara.
- c. Banyaknya 'problem malignancy' atau masalah-masalah yang berkembang di suatu negara yang tidak kunjung terselesaikan yang menyebabkan masalah-masalah sosial harus mendapatkan skala prioritas atau tidak tertangani sesecara seluruhnya.

Uraian mengenai konsep di atas kemudian memberikan sebuah pemahaman bahwa kegagalan pemerintah India dalam menurunkan dan menangani perdagangan

⁹ Nathalie Rothchild, "The Free Practice of Counter Human Trafficking" dalam James Loveland, *Pop Culture and Social Disorientation*, Palgraff Publishing, London-New York, 2006, hal.97.

¹⁰ *Ibid.*

perempuan ternyata dipengaruhi oleh berbagai hal yang bersifat kekinian, bukan hanya sebagai wujud pelanggaran hukum positif yang berlaku, namun juga menyangkut masalah sosial, misalnya kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan lain-lainnya.

Kegagalan sebuah peran pemerintah ternyata tidak lepas dari faktor internal dan eksternal. Ini dapat saja didominasi oleh salah satu faktor, namun dapat juga kombinasi seimbang diantara keduanya. Menurut Richard Snyder realisasi kebijakan yang dapat saja berhasil, belum berhasil atau tidak berhasil dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu situasi dalam negeri dan berbagai atribut yang mempengaruhinya dan faktor eksternal yaitu situasi internasional dan berbagai atribut yang mempengaruhinya.¹¹ Faktor eksternal dapat juga didominasi oleh kondisi regional, dimana ini akan membentuk sebuah sentimen yang berkembang dan mempengaruhi sebagai "influencer" (subyek yang mempengaruhi) secara langsung ataupun tidak langsung.

Gambaran mengenai teori peran di atas kemudian akan dielaborasi dengan konsep keterbatasan sumber daya negara dunia ketiga (kelompok negara berkembang). Menurut Quincy Wright menyatakan bahwa peran negara dalam mengendalikan stabilitas sosial dan keamanan dalam negeri tergantung dengan empat aspek, masing-masing, yaitu :¹²

¹¹ Mohtar Mas'ood, *Ibid.*, hal.20.

¹² Quincy Wright, "Security and Social Dilemmas", Louis J. Helle, *Element of International Strategy*, Washington University Press, Washington, 1989, hal.96.

- a. Faktor politik, yaitu menyangkut dukungan politik dari aktor-aktor dalam negeri, antara lain kelompok kepentingan, partai politik dan keberpihakan oposisi. Faktor ini memiliki keterkaitan dengan kapabilitas kepemimpinan dan "political will", serta masalah-masalah politik yang berkembang. Pada tahun 1995 hingga 2008 India menghadapi berbagai persoalan, antara lain separatisme, terorisme, perekonomian dan lain-lainnya, dimana ini berdampak pada tidak optimalnya penanganan perdagangan perempuan.

- b. Faktor geografis, yaitu menyangkut karakteristik kewilayahan. Sebuah negara yang memiliki perbatasan luas atau memiliki jalur perairan akan mempersulit sistem pengamanan. Keberadaan India sebagai salah satu negara di Asia Selatan memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar. Ini kemudian menimbulkan masalah tersendiri tentang sulitnya penanganan masalah-masalah kewilayahan.

- c. Faktor ekonomi, yaitu menyangkut kemampuan dari suatu negara untuk membentuk dukungan secara finansial dan operasional, menyangkut penyediaan peralatan (*equipment*), pemeliharaan, gaji pegawai dan lain-lainnya. Pada kasus di India masalah ini menyangkut terbatasnya anggaran negara yang harus teralokasikan ke berbagai bidang yang kompleks. Ini kemudian menyebabkan terbengkalainya masalah perdagangan perempuan yang tentunya membutuhkan alokasi anggaran secara taktis.

d. Faktor sosial, yaitu menyangkut dukungan masyarakat di seluruh lini, baik wilayah urban ataupun daerah antara lain melalui sikap, peran aktif, pengucilan (*excommunications*) dan bentuk-bentuk lainnya. Apabila dikaitkan dengan kasus di India maka faktor sosial adalah menyangkut sikap permisifnya masyarakat karena perdagangan perempuan bukan hanya terkait dengan tindakan "soft criminal", namun juga kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat India.

Quincy Wright juga menyatakan bahwa parameter kegagalan sebuah kebijakan yang dijalankan suatu negara terdiri dari empat hal, yaitu :¹³

- a. Derajat dari penurunan kasus / permasalahan.
- b. Derajat dari pelenyapan kasus / permasalahan.
- c. Derajat dari munculnya kasus-kasus serupa yang menyertainya secara kontinyu.
- d. Derajat dari munculnya kasus-kasus serupa yang menyertainya secara kontinyu.

Empat parameter yang dikemukakan oleh Quincy Wright bersifat universal. Artinya kasus yang terjadi di satu negara dengan negara lainnya cenderung berbeda-beda. Dapat saja hanya satu, dua parameter atau kombinasi diantara beberapa parameter. Apabila dikaitkan dengan kasus human trafficking yang terjadi di India parameter di atas menyangkut kasus human trafficking sebagai masalah yang tidak kunjung terselesaikan dan adanya tren peningkatan kasus dari tahun ke tahun.

¹³ *Ibid.*

PBB memberikan sebuah penjelasan tentang faktor-faktor yang umumnya melatarbelakangi *human trafficking* sebagai bentuk kejahatan, yaitu menyangkut kesempatan (*opportunity*), faktor pendorong dan penarik yang menyangkut kondisi sosial-ekonomi negara yang bersangkutan. Dengan demikian maka dapat dijelaskan *human trafficking* sebenarnya juga tidak lepas dari faktor permintaan (faktor penarik) dan faktor penawaran (*supply*) atau faktor pendorong yang melibatkan negara asal dan tujuan.¹⁴

Melalui konsep pendorong dan penarik dapat diketahui bahwa alasan-alasan yang memotivasi para pelaku *human trafficking* untuk meninggalkan tanah airnya dimotivasi oleh beberapa hal antara lain, masalah ekonomi, kesejahteraan, jaminan hukum dan keamanan. Menurut Stephen Castles dan Mark J Miller, pendekatan neoklasik sering disebut sebagai *Push-Pull Factor Theory*,¹⁵ dimana penyebab *human trafficking* sering dikaitkan dengan *Push Factor Theory* dan *Pull Factor Theory*. *Push Factor Theory* yaitu merupakan faktor-faktor pendorong dari negara para pelaku dan korban *human trafficking* berasal, mengungkapkan mengapa para migran melakukan migrasi atau keluar dari wilayah negaranya menuju dan bertempat tinggal di wilayah negara lain. *Push Factor Theory* ini meliputi:

- a. Pertumbuhan penduduk, yaitu peningkatan penduduk yang tidak terkendali dan peningkatan yang tidak merata dalam suatu wilayah dan menjadikan sulitnya mendapatkan pekerjaan.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Stephen Castel & Mark J Miller, *The Age Of Migration: International Population Movements In The Modern World*, Second Edition, MacMillan Press Ltd, London, 1998, hal. 20.

- b. Standar hidup yang rendah, yaitu rendahnya upah yang diperoleh pekerja sehingga tidak mencukupi untuk standar kebutuhan hidup.
- c. Kesempatan ekonomi yang kurang, yaitu minimnya peluang ekonomi akibat perkembangan ekonomi yang kurang dan tingkat perkembangan teknologi yang lamban.
- d. Adanya tekanan politik, yaitu akibat tidak stabilnya keadaan politik di wilayah itu sehingga tidak stabilnya keadaan politik di wilayah itu sehingga tidak terjaminnya keamanan seperti yang diharapkan.¹⁶

Sedangkan *Pull Factor Theory* yaitu merupakan faktor-faktor yang menarik seseorang untuk datang ke suatu wilayah atau negara yang baru, yaitu negara yang akan dituju oleh imigran untuk menetap dan bertempat tinggal. Ini meliputi:

- a. Adanya permintaan tenaga kerja, yaitu minimnya tenaga kerja yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan ataupun lapangan kerja lainnya.
- b. Tersedianya lahan untuk bertempat tinggal, yaitu tersedianya lahan secara geografis yang masih banyak belum dipergunakan.
- c. Serta adanya kebebasan dalam berekonomi dan politik, yaitu peluang ekonomi yang besar dan keadaan politik yang memungkinkan untuk ditempati.¹⁷

Dalam pendekatan neo-klasik, dikenal teori equilibrium *human trafficking*, teori ini sangat penting dan sangat sering sekali digunakan untuk menganalisa

¹⁶ Stephen Castel, *ibid*, hal. 20.

¹⁷ Stephen Castel, *ibid*, hal. 20.

produktifitas. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa *human trafficking* sebenarnya telah terjadi pada kurun waktu yang sangat lama. Menurut teori ini *human trafficking* selain dipandang sebagai cara untuk melanjutkan atau melangsungkan hidup, juga dapat di lihat sebagai bentuk mekanisme pengurangan ketimpangan wilayah dan ketimpangan ekonomi yang meliputi perbedaan upah perbedaan kesempatan kerja, ketimpangan distribusi lahan serta ketimpangan sumber daya alam.¹⁸

Mendekati tahun 2000 masyarakat India menghadapi kemiskinan yang parah. Beberapa kasus terjadi di wilayah Andhra Pradesh, Manipur, Tripura. Masalah ini semakin kompleks setelah terjadi kasus rawan pangan, iklim yang tidak kondusif yang menyebabkan kekeringan dan cuaca ekstrem. Akibatnya masyarakat wilayah rural sebagian diantaranya menjalankan peruntungan untuk masuk dalam perdagangan perempuan.

Faktor pendorong lainnya adanya tradisi sosial dan keterbelakangan masyarakat India. Di negara ini perempuan dianggap sebagai kelompok kelas dua yang terbatas pada akses bidang pendidikan, politik dan kiprah dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan. Akibatnya banyak diantaranya perempuan di India yang terlibat perdagangan perempuan secara sadar atas dasar saling membutuhkan atau lebih tepatnya terdapat sebuah mekanisme simbiosis mutualisme.

Faktor lainnya yang menyebabkan peningkatan perdagangan perempuan di India adalah adanya faktor penarik. Ketersediaan lapangan kerja di sektor-sektor

¹⁸ Abdul Haris, *Kucuran Keringat dan Derap Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 18.

formal, misalnya restoran, buruk kasar, karyawan hingga prostitusi sebagai obyek dari tujuan perdagangan perempuan. Ini berlangsung karena para korban sendiri menganggap bahwa kondisi ini jauh lebih baik daripada berada ketidakpastian di wilayah asalnya, meskipun konsekuensinya adalah minimnya perlindungan terhadap keselamatan dari para korban itu sendiri.

D. Hipotesa

Melalui uraian kerangka dasar pemikiran di atas maka dapat ditarik hipotesa bahwa upaya yang dijalankan pemerintah India dalam menangani masalah perdagangan perempuan pada periode tahun 1995 hingga 2008 adalah melalui pendekatan penegakan hak asasi manusia (HAM) dan melalui sikap-sikap politik yang diwujudkan dalam pidato-pidato kenegaraan yang menegaskan tentang pentingnya penanganan masalah perdagangan perempuan. Sampai tahun 2008 masalah ini masih terjadi karena adanya dua hal, yaitu :

1. Adanya faktor pendorong (*push factor*) yang menyebabkan perdagangan perempuan di India terus terjadi, yaitu :
 - a. Kemiskinan
 - b. Tradisi sosial
 - c. Keterbelakangan masyarakat India.
2. Adanya faktor penarik (*pull factor*), yang menyebabkan perdagangan perempuan di India terus terjadi, yaitu :

- a. Potensi lapangan kerja di wilayah perkotaan dan negara lain yang dianggap lebih memadai
 - b. Adanya fasilitas yang lebih memadai di wilayah perkotaan.
3. Lemahnya penegakan aturan yang dijalankan Pemerintah India yang berperan untuk memutus mata rantai perdagangan perempuan India.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada analisa data-data yang sifatnya non-angka dan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik sebagai pendekatannya.¹⁹ Sedangkan analisis data penulis menggunakan deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk menggambarkan situasi yang dipandang relevan secara obyektif dan jelas atas dasar fakta-fakta yang terjadi untuk kemudian diambil kesimpulan dan selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penulisan karya skripsi ini.

Fakta atau informasi yang memanfaatkan data sekunder yang digunakan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam karya skripsi ini. Proses analisa dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dimana data yang telah dikumpulkan dan kemudian disusun dan dipaparkan sehingga ditemukan gambaran yang sistematis dari permasalahan penelitian.²⁰

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal.12.

²⁰ Catherine Cassel and Gillian Symon (ed), *Qualitative Methods in Organizational Research*, Sage Publications, London, 1994, hal.3-4.

Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui penelitian perpustakaan (*library research*). Data-data yang telah dikumpulkan merupakan data-data sekunder, yang artinya dalam penulisan ini penulis tidak menjalankan observasi (penelitian) langsung namun lebih mengacu pada sumber-sumber yang telah ada, yang diolah melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Data-data dikumpulkan dan diolah melalui :

1. Buku-buku
2. Surat Kabar dan Majalah
3. Jurnal Sosial Politik dan Artikel
4. Internet (*Web Site*).

F. Tujuan Penelitian

1. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjawab perumusan masalah serta membuktikan hipotesa tentang kebijakan yang dijalankan pemerintah India yang belum menunjukkan keberhasilan dalam menangani masalah perdagangan perempuan, dimana masih terjadi peningkatan perdagangan perempuan di India tahun 1995 hingga 2008.
2. Penulisan ini ditujukan sebagai informasi kepada pembaca dan pihak-pihak khususnya segenap civitas akademika Ilmu Hubungan Internasional tentang dinamika perdagangan perempuan di India.

3. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Spesialisasi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam rangka mempermudah penulisan karya skripsi ini penulis memberikan batasan penelitian sejak 1995 hingga 2008. Dipilihnya tahun 1995 karena masalah perdagangan perempuan di India menjadi isu sosial yang mengemuka di negara ini, sedangkan tahun 2008 sebagai tahun yang menunjukkan tolok ukur tentang meningkatnya masalah perdagangan perempuan di India. Jangkauan di luar tahun tersebut sedikit disinggung selama masih ada keterkaitan dan korelevansi dengan tema yang sedang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan bab-bab selanjutnya, penulis akan membagi pembahasan ke dalam lima bab, dengan perincian masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang demografi India dan dinamika masalah perdagangan perempuan di India pada periode tahun 1995-2008 dan berbagai

dinamika yang mempengaruhinya, serta kebijakan-kebijakan pemerintah India dalam menangani masalah ini yang sampai tahun 2008 belum menunjukkan keberhasilan.

BAB III merupakan bab pembuktian hipotesa pertama yang membahas tentang kasus belum berhasilnya kebijakan pemerintah India dalam menangani masalah perdagangan perempuan, dimana masih terjadi peningkatan perdagangan perempuan di India tahun 1995 hingga 2008 yang diakibatkan adanya faktor pendorong (*push factor*), yaitu kemiskinan, tradisi, sosial dan keterbelakangan masyarakat India.

BAB IV merupakan bab pembuktian hipotesa kedua yang membahas tentang kasus belum berhasilnya kebijakan pemerintah India dalam menangani masalah perdagangan perempuan, dimana masih terjadi peningkatan perdagangan perempuan di India tahun 1995 hingga 2008 yaitu adanya faktor penarik (*pull factor*), yang diakibatkan potensi lapangan kerja di wilayah perkotaan dan negara lain yang dianggap lebih memadai dan adanya fasilitas yang lebih memadai di wilayah perkotaan, serta lemahnya penegakan aturan yang dijalankan pemerintah India yang berperan dalam memutus mata rantai perdagangan perempuan di negara ini.

BAB V berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya